

TUGAS AKHIR//

**TRANSPARANSI KEUANGAN KAMPUNG DALAM
PERSPEKTIF**

KINERJA PERANGKAT KAMPUNG

(Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)

YANCE HENDRIK MOFU

8160302251121



**MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TRANSPARANSI KEUANGAN KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF

KINERJA PERANGKAT KAMPUNG

(Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)

Nama : YANCE HENDRIK MOFU

NIM : 8 1 6 0 3 0 2 2 5 1 1 2 1

Program Studi : Magister Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si. Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Manajemen

Prof . Dr. H. Baharuddin, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSPARANSI KEUANGAN KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF

KINERJA PERANGKAT KAMPUNG

(Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)

Disusun dan Diajukan oleh:

YANCE HENDRIK MOFU

8 1 6 0 3 0 2 2 5 1 1 2 1

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal, 30 Juli 2026

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si.

Dr. Kristian H.P. Lambe, MM., M.Si.

Direktur

Pascasarjana

Ketua

Program Studi

Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **YANCE HENDRIK MOFU**

NIM **8160302251121**

Program Studi Magister Manajemen

Konsentrasi **Manajemen Keuangan**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/Tesis yang berjudul:
"TRANSPARANSI KEUANGAN KAMPUNG DALAM PERSPEKTIF KINERJA PERANGKAT KAMPUNG (Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)"

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, kecuali bagian-bagian tertentu yang dijadikan rujukan dan telah disebutkan sumbernya secara benar sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, termasuk pembatalan gelar akademik yang telah diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuni, 30 Juli 2026

YANCE HENDRIK MOFU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi keuangan Kampung dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Fokus penelitian meliputi: (1) tingkat transparansi keuangan Kampung, (2) kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung, dan (3) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transparansi keuangan Kampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi kasus**. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling** yang terdiri atas 11 orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan Kampung Atibo telah terlaksana dengan **cukup baik**, yang ditunjukkan melalui keterbukaan informasi APBDes, penyampaian laporan realisasi anggaran, pelaksanaan musyawarah kampung, serta penyediaan papan informasi dan media publikasi kepada masyarakat. Kinerja perangkat Kampung juga berada pada kategori **baik**, yang tercermin dari meningkatnya kualitas administrasi, koordinasi antar perangkat Kampung, kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transparansi keuangan Kampung sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat Kampung. Peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Transparansi Keuangan Kampung, Kinerja Perangkat Kampung, Akuntabilitas, Good Governance, Pengelolaan Keuangan Kampung.

ABSTRACT

This study aims to analyze village financial transparency from the perspective of the performance of village officials in Atibo Village, Manimeri District, Teluk Bintuni Regency. The study focuses on: (1) the level of village financial transparency, (2) the performance of village officials in realizing village financial transparency, and (3) the supporting and inhibiting factors affecting village financial transparency.

This research employed a **qualitative approach** using a **case study** method. Informants were selected through **purposive sampling**, consisting of 11 participants, including the Head of the Community and Village Empowerment Office (DPMK), the Secretary of the Office, division heads, section heads, subdivision heads, and administrative staff of the Community and Village Empowerment Office of Teluk Bintuni Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation.

The findings indicate that village financial transparency in Atibo Village has been implemented **fairly well**, as reflected in the disclosure of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), the presentation of budget realization reports, the implementation of village deliberation meetings, and the provision of public information through information boards and budget billboards. The performance of village officials was also categorized as **good**, as demonstrated by improved administrative quality, effective coordination among village officials, compliance with financial management procedures, and a strong commitment to providing financial information services to the community.

This study concludes that the success of village financial transparency is strongly influenced by the performance of village officials. Improving the competence of village officials, strengthening the supervision system, optimizing the use of information technology, and increasing community participation are essential strategies for achieving transparent, accountable, effective, and good governance-oriented village financial management.

Keywords: Village Financial Transparency, Village Officials' Performance, Accountability, Good Governance, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Tesis yang berjudul "**Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung (Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Magister Manajemen** pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, atas kasih karunia, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan seluruh proses studi dan penyusunan tesis ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.T.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Manajemen.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen sekaligus Ketua Komisi Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, motivasi, kritik, dan saran yang sangat berharga sejak penyusunan proposal hingga terselesaikannya tesis ini.
4. **Bapak Dr. Kristian H.P. Lambe, M.M., M.Si.**, selaku Sekretaris Komisi Pembimbing, yang telah memberikan perhatian, masukan, koreksi, dorongan, serta bimbingan ilmiah yang konstruktif sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
6. Seluruh tenaga kependidikan Program Pascasarjana Universitas Kristen

Indonesia Paulus Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama penulis menjalani studi.

7. **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni** beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin penelitian, bantuan, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data yang diperlukan selama proses penelitian.
8. **Pemerintah Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni**, seluruh perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPD), serta masyarakat Kampung Atibo yang telah menerima penulis dengan baik dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Istri dan Anak-Anak tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan dukungan moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan.
10. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar, saudara-saudara, serta seluruh kerabat yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, perhatian, dan dukungan moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kerja sama selama proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan sektor publik, serta menjadi referensi bagi Pemerintah Kampung, Pemerintah Daerah, akademisi, dan peneliti selanjutnya dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan Kampung yang lebih baik.

Makassar, 30 Juli 2026

Penulis,

YANCE HENDRIK MOFU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Konsep Transparansi	11
2.1.2 Transparansi Keuangan Kampung	
.....	15
2.1.3 Kinerja Perangkat Kampung	
.....	22
2.1.4 Good Governance	28
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Kampung	
.....	33
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.3 Jenis dan Sumber Data	50

3.4 Informan Penelitian	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Instrumen Penelitian	54
3.7 Teknik Analisis Data	55
3.8 Uji Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni	60
4.2 Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung	66
4.3 Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni	72
4.4 Latar Belakang dan Karakteristik Informan	77
4.5 Hasil Penelitian	83
4.6 Pembahasan	101
4.7 Solusi dan Pengembangan	122
BAB V PENUTUP	129
5.1 Kesimpulan	129
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	141
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Daftar Informan Penelitian	
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara	
Lampiran 10. Riwayat Hidup Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan Kampung yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan Kampung yang baik (*good village governance*). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan Kampung harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Kampung, alokasi anggaran yang diterima Kampung terus meningkat signifikan, dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai Rp72 triliun pada tahun 2024 (JADMENT, 2024). Besaran dana yang semakin besar ini menuntut pengelolaan yang semakin profesional, khususnya dari sisi transparansi keuangan.

Transparansi keuangan Kampung bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen strategis yang mendorong kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pembangunan. Penelitian Syafi'i Putra dan Sumtaky (2026) yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan Kampung yang diwujudkan melalui forum Musyawarah Kampung, infografis APBDes, dan pemanfaatan media digital secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Kampung. Senada dengan itu, Ratnasari dan Rahmawati (2024) mengonfirmasi bahwa kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Kampung sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen perangkat Kampung sebagai pelaksana teknis.

Perangkat Kampung memiliki peran sentral dalam mewujudkan transparansi keuangan. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat Kampung secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Kampung. Namun demikian, tingkat implementasi prinsip transparansi masih sangat bervariasi antarKampung, bergantung pada kompetensi SDM perangkat Kampung, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta komitmen

kepemimpinan kepala Kampung. Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2022 mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah dan Kampung masih mendapatkan nilai "CC" dan "C" terkait akuntabilitas kinerja (Bappenas Working Paper, 2024).

Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Daya, kondisi pengelolaan keuangan Kampung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di Kampung-Kampung yang terletak di wilayah terpencil seperti Kampung Atibo, Distrik Manimeri. Kampung Atibo merupakan Kampung dengan karakteristik geografis yang terisolir, keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas SDM perangkat Kampung yang masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks demikian, pelaksanaan prinsip transparansi keuangan Kampung menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan Kampung-Kampung di wilayah perkotaan yang telah memiliki akses terhadap Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes) dan kanal informasi digital.

Implementasi Siskeudes sebagai sistem informasi pengelolaan keuangan Kampung menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong transparansi. Penelitian Hidayati (2023) dan Anggraeni (2022) menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes yang optimal berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Kampung. Sementara itu, kajian terbaru oleh Maisyaroh dan Hidayat (2026) dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan membuktikan bahwa kompetensi pemerintah Kampung, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung dengan kontribusi sebesar 51,8%.

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji transparansi keuangan Kampung dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Keunikan lokasi penelitian ini terletak pada konteks wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang memiliki dinamika pengelolaan keuangan Kampung yang berbeda dengan Kampung-Kampung pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan menKampungk untuk dilakukan guna menghasilkan pemetaan kondisi, identifikasi hambatan, serta rekomendasi strategis dalam peningkatan transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni?
2. Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transparansi keuangan Kampung dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Mengevaluasi kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan administrasi pemerintahan Kampung, khususnya mengenai hubungan antara transparansi keuangan dan kinerja perangkat Kampung dalam konteks wilayah 3T di Indonesia bagian timur. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya referensi akademik terkait tata kelola keuangan Kampung di Papua.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perangkat Kampung Atibo, hasil penelitian ini dapat dijadikan cerminan kondisi aktual dan panduan untuk meningkatkan transparansi keuangan. Bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk merancang program kapasitas dan pendampingan perangkat Kampung. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini menjadi referensi untuk studi lanjutan mengenai tata kelola keuangan Kampung di wilayah terpencil Papua Barat Daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi Keuangan Kampung

2.1.1 Konsep dan Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat. Transparansi mensyaratkan tersedianya informasi yang terbuka, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Menurut Tanjung (2014) mendefinisikan transparansi keuangan publik sebagai keterbukaan mengenai semua aspek kebijakan, keputusan-keputusan, dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah, termasuk informasi mengenai rencana, proses, dan realisasi anggaran. Dalam konteks pemerintahan Kampung, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai APBDes, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme musyawarah Kampung yang partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung yang mewajibkan Kampung untuk menyampaikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

2.1.2 Indikator Transparansi Keuangan Kampung

Menurut kajian Syafi'i Putra dan Sumtaky (2026) dalam penelitiannya di Kampung Gondowangi, Kabupaten Malang, transparansi keuangan Kampung dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) forum Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Kampung (Musdes), dan Musrenbangdes sebagai wahana keterbukaan perencanaan; (2) publikasi infografis APBDes yang mudah dipahami masyarakat; (3) pemanfaatan media digital seperti WhatsApp dan website Kampung untuk kemudahan akses informasi; serta (4) pemasangan papan informasi anggaran di kantor Kampung dan tempat strategis lainnya.

Lihawa et al. (2025) dalam *Jambura Accounting Review* mengidentifikasi bahwa transparansi pengelolaan dana Kampung diukur melalui empat dimensi utama: ketersediaan informasi keuangan, kemudahan akses informasi, kelengkapan dokumen pelaporan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian yang dilakukan pada Kampung-Kampung di Kabupaten Gorontalo ini menemukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung.

2.1.3 Tren Transparansi Dana Kampung 2016–2024

Kajian tren oleh Rusdi et al. (2024) yang dipublikasikan dalam *JADMENT: Journal of Administration and Development* mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan dana Kampung di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan selama satu dekade terakhir, dengan peningkatan alokasi yang sangat besar dari Rp20,8 triliun pada 2015 menjadi Rp72 triliun pada 2024. Namun, peningkatan alokasi ini belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas, terutama di Kampung-Kampung terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM.

Laporan BPK (2023) menyebutkan masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam pengelolaan dana Kampung, mulai dari ketidaksesuaian penggunaan anggaran, lemahnya pelaporan keuangan, hingga minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Kondisi ini mendorong pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap transparansi keuangan Kampung, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua Barat Daya.

2.2 Kinerja Perangkat Kampung

2.2.1 Konsep Kinerja Perangkat Kampung

Kinerja perangkat Kampung merupakan hasil kerja yang dicapai oleh aparat Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Wibowo (2007), kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dalam konteks pemerintahan Kampung, kinerja perangkat Kampung dinilai dari kemampuannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola keuangan Kampung secara transparan dan akuntabel, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Slamet (2023) mendefinisikan aparat Kampung sebagai penggerak pembangunan Kampung yang bertugas memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga Kampung dalam berbagai aspek pembangunan. Kompetensi perangkat Kampung sebagai pelaksana teknis menjadi faktor penentu dalam menjamin kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab (Jurnal BAES, 2024).

2.2.2 Peran Perangkat Kampung dalam Transparansi Keuangan

Penelitian empiris yang dilakukan di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2022) membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat Kampung secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan Kampung. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja perangkat Kampung merupakan variabel kunci yang menentukan kualitas tata kelola keuangan Kampung.

Anggraeni (2022) dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana mengkaji peran aplikasi Siskeudes terhadap akuntabilitas dana Kampung dan kinerja aparatur di Kampung Tulungrejo. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemanfaatan Siskeudes secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan aparatur Kampung dalam mengoperasikan sistem. Temuan ini menegaskan betapa pentingnya kinerja dan kompetensi perangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan yang transparan.

Pratiwi dan Ulfa (2018) dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah Kampung dalam akuntabilitas mengidentifikasi bahwa pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan motivasi merupakan determinan utama kinerja perangkat Kampung. Senada dengan itu, Suwanti dan Hermanto (2020) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Kampung.

2.2.3 Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Kampung

Safitri et al. (2023) dalam Jambura Accounting Review Vol. 4 No. 2 membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kampung. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi perangkat Kampung, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya transparansi keuangan.

Penelitian Maisyarah dan Hidayat (2026) di Kecamatan Waru, Sidoarjo, memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah Kampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung ($t = 2,275$, sig. 0,026).

Dwi Pramudita et al. (2024) dalam Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan mengkaji secara komprehensif bagaimana peran kompetensi SDM terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kajian ini menggarisbawahi bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi SDM, termasuk perangkat Kampung, merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang optimal.

2.3 Hubungan Transparansi Keuangan dan Kinerja Perangkat Kampung

Hubungan antara transparansi keuangan dan kinerja perangkat Kampung bersifat resiprokal. Di satu sisi, kinerja perangkat Kampung yang baik—yang tercermin dari kompetensi, integritas, dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya—menjadi prasyarat bagi terwujudnya transparansi keuangan yang berkualitas. Di sisi lain, transparansi keuangan yang baik mendorong akuntabilitas publik yang pada gilirannya menciptakan tekanan positif bagi perangkat Kampung untuk meningkatkan kinerjanya.

Setyoningsih dan Irianto (2023) dalam kajiannya di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, kemampuan kerja, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah Kampung. Demikian pula, Defitri (2022) membuktikan bahwa pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur daerah. Penelitian yang lebih spesifik pada konteks Kampung oleh Mojo dan Rahayu (2023) menegaskan pengaruh positif akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana Kampung.

Dalam kerangka teori keagenan (Agency Theory), perangkat Kampung berposisi sebagai agen yang mendapat mandat dari masyarakat Kampung (prinsipal) untuk mengelola keuangan Kampung. Transparansi keuangan merupakan mekanisme pengungkapan yang mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, sehingga mendorong perangkat Kampung untuk menjalankan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab dan berkinerja optimal.

2.4 Good Village Governance

Konsep tata kelola pemerintahan Kampung yang baik (good village governance) menjadi landasan normatif dalam penelitian ini. Menurut Mulanda dan Adnan (2023) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, implementasi teori good governance dalam pemerintahan Kampung mencakup prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, persamaan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama untuk menjamin bahwa penggunaan dana Kampung dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab (Puspa, 2024).

Kajian oleh Setyaningrum et al. (2024) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Kampung dalam mewujudkan good governance. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara ketiga prinsip tersebut dalam membangun tata kelola Kampung yang baik dan berkelanjutan.

2.5 Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Kampung

Pengelolaan keuangan Kampung diatur dalam sejumlah regulasi utama yang membentuk landasan yuridis penelitian ini:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, yang mengatur siklus pengelolaan keuangan Kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Kampung Setiap Kampung, Penggunaan dan Penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. **Syafi'i Putra dan Sumtaky (2026)** dalam "Transparansi Laporan Keuangan Kampung dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Kampung" (Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4 No. 3). Penelitian di Kampung Gondowangi, Kabupaten Malang ini menemukan bahwa transparansi melalui forum Musdes, infografis APBDes, dan media digital meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Kampung dengan tingkat serapan anggaran rata-rata 82,17%.
2. **Maisyaroh dan Hidayat (2026)** dalam "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Kampung, Transparansi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo" (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 12 No. 3.D). Penelitian kuantitatif dengan 85 responden aparat Kampung ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas ($t = 3,791$, sig. 0,000), dengan $R^2 = 0,518$.
3. **Lihawa, Noholo, dan Lukum (2025)** dalam "Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung" (Jambura Accounting Review, Vol. 6 No. 1). Penelitian ini membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Kampung. DOI: 10.37905/jar.v6i1.148.
4. **Wijiyono, Sari, dan Ningsih (2025)** dalam "Implementasi Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes) dalam Menunjang Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Kampung Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi" (RISTANSI: Riset Akuntansi, Vol. 6 No. 1). Penelitian ini mengkaji bagaimana Siskeudes berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Kampung. DOI: 10.32815/ristansi.v6i1.2288.
5. **Setyaningrum, Dewi, dan Kusuma (2024)** dalam "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kampung dalam Mewujudkan Good Governance" (Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, Vol. 3 No. 3). Penelitian ini membuktikan pengaruh positif simultan

ketiga variabel tersebut terhadap terwujudnya good governance Kampung. DOI: 10.53088/jikab.v3i3.104.

6. **Ratnasari dan Rahmawati (2024)** dalam "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Kampung" (Vol. 3 No. 4). Penelitian ini menganalisis secara komprehensif kondisi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Kampung sebagai cerminan kinerja perangkat Kampung.
7. **Rusdi et al. (2024)** dalam "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung: Analisa Tren Pengelolaan Dana Kampung 2016–2024" (JADMENT: Journal of Administration and Development). Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tren implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kampung selama satu dekade.
8. **Penelitian di Kecamatan Bumijawa (UTILITY, 2024)** dalam "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Se-Kecamatan Bumijawa" (UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 8 No. 1). Penelitian dengan 160 responden ini menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Kampung. DOI: 10.30599/utility.v8i1.3231.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, penelitian ini dibangun di atas kerangka pemikiran bahwa transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni merupakan fungsi dari kinerja perangkat Kampung yang mencakup dimensi kompetensi teknis, komitmen terhadap prinsip keterbukaan, dan kapasitas memanfaatkan sistem informasi keuangan Kampung (Siskeudes). Kinerja perangkat Kampung dalam transparansi keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual berupa: (1) kapasitas SDM perangkat Kampung; (2) ketersediaan infrastruktur teknologi informasi; (3) pengawasan oleh BPD dan masyarakat; serta (4) dukungan regulasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten.

Kerangka penelitian ini mengintegrasikan perspektif Agency Theory, konsep good village governance, serta pendekatan evaluasi kinerja berbasis value for money yang mengukur efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi penggunaan anggaran Kampung. Evaluasi dilakukan terhadap lima aspek transparansi keuangan Kampung: (1)

penyusunan APBDes secara partisipatif, (2) keterbukaan dokumen keuangan kepada publik, (3) pelaporan realisasi anggaran secara berkala, (4) pertanggungjawaban penggunaan dana, dan (5) mekanisme pengawasan berbasis masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (qualitative descriptive approach), yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2011). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kondisi aktual transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo, yang merupakan fenomena yang bersifat kontekstual, kompleks, dan tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka-angka semata.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study), sebuah strategi penelitian yang mencakup penggunaan berbagai sumber data untuk menyelidiki sebuah kasus atau beberapa kasus secara mendalam. Pemilihan studi kasus didasarkan pada sifat penelitian yang memusatkan perhatian pada Kampung Atibo sebagai kasus tunggal yang memiliki keunikan konteks geografis, demografis, dan institusional. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam "bagaimana" dan "mengapa" transparansi keuangan Kampung beroperasi dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di lokasi tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Kampung Atibo merupakan Kampung yang memiliki karakteristik wilayah 3T yang khas di Papua Barat Daya, dengan tantangan transparansi keuangan yang belum terdokumentasi secara akademis; (2) adanya kebutuhan menKampung dari pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual tata

kelola keuangan Kampung-Kampung di Distrik Manimeri; dan (3) aksesibilitas data dan narasumber yang memadai bagi peneliti.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama enam bulan, dimulai dari tahap persiapan (penyusunan instrumen dan perizinan) hingga tahap finalisasi laporan penelitian. Pengumpulan data lapangan dijadwalkan selama kurang lebih dua bulan, dengan kemungkinan perpanjangan apabila diperlukan untuk memenuhi kejenuhan data (data saturation).

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini dipilih secara purposive, mencakup: (1) Kepala Kampung Atibo selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Kampung; (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator administrasi keuangan; (3) Bendahara Kampung selaku pengelola teknis keuangan; (4) Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPD) selaku lembaga pengawas; (5) Pendamping Kampung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni; serta (6) Tokoh masyarakat dan warga Kampung yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

Objek penelitian adalah transparansi keuangan Kampung dalam perspektif kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo, yang mencakup lima dimensi: (1) mekanisme perencanaan dan penyusunan APBDes, (2) aksesibilitas dan keterbukaan informasi keuangan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, (4) pengawasan berbasis masyarakat dan BPD, serta (5) kompetensi dan kinerja perangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan yang telah ditentukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Panduan wawancara disusun berdasarkan lima dimensi transparansi keuangan yang menjadi fokus penelitian. Wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis. Estimasi durasi setiap sesi wawancara adalah 60–90 menit.

3.4.2 Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan keuangan Kampung, mekanisme pelaporan, cara penyampaian informasi kepada masyarakat, dan interaksi antara perangkat Kampung dengan masyarakat. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap kelengkapan infrastruktur pengelolaan keuangan (komputer, internet, Siskeudes) di kantor Kampung Atibo, serta keberadaan papan informasi APBDes dan realisasi anggaran.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi mencakup telaah terhadap dokumen-dokumen keuangan Kampung, antara lain: APBDes tahun anggaran 2022–2024, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban (LPj), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPDDes), dokumen Musrenbangdes, dan hasil pemeriksaan aparat pengawas. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memperoleh gambaran faktual tentang kualitas pelaporan keuangan Kampung.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari empat komponen yang berjalan secara simultan:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen untuk menghasilkan tema-tema yang relevan.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Pengorganisasian informasi yang terkondensasi ke dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan, seperti matriks, bagan alur, dan narasi deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*): Pemaknaan temuan penelitian secara interpretif dan pengecekan ulang terhadap data untuk memastikan validitas kesimpulan.

Untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang meliputi: (a) triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai informan; (b) triangulasi metode, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta (c) triangulasi teori, yakni menginterpretasikan temuan melalui berbagai perspektif teoretis yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni

Kampung Atibo merupakan salah satu Kampung yang berada di wilayah administrasi **Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat**. Kampung ini termasuk dalam kawasan yang mengalami perkembangan cukup pesat dibandingkan beberapa Kampung lain di Distrik Manimeri karena letaknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni. Posisi tersebut memberikan keuntungan dalam hal akses pelayanan pemerintahan, pembinaan aparatur Kampung, pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan perekonomian masyarakat.

Secara geografis, Kampung Atibo memiliki wilayah yang didominasi oleh kawasan dataran rendah dengan vegetasi hutan tropis serta lahan yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pekerjaan informal lainnya. Selain masyarakat asli Papua, Kampung Atibo juga dihuni oleh masyarakat pendatang sehingga kehidupan sosial masyarakat berlangsung dalam suasana yang heterogen namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kampung Atibo dipimpin oleh seorang kepala Kampung yang dibantu oleh sekretaris Kampung, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, serta perangkat Kampung lainnya. Pemerintah Kampung memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung beserta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai salah satu Kampung penerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung setiap tahun, Pemerintah Kampung Atibo memiliki kewajiban mengelola keuangan Kampung secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kampung Atibo juga secara aktif melaksanakan musyawarah kampung sebagai media penyusunan rencana pembangunan sekaligus penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran Kampung kepada masyarakat. Selain itu, informasi mengenai APBDes dan realisasi anggaran dipublikasikan melalui papan informasi maupun baliho sebagai bentuk implementasi prinsip keterbukaan informasi publik. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kampung sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Atibo tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya keuangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur Kampung. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perangkat Kampung melalui pembinaan dan pelatihan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).

Dengan kondisi tersebut, Kampung Atibo menjadi salah satu Kampung yang memiliki potensi cukup baik dalam menerapkan tata kelola pemerintahan Kampung yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu terus diperbaiki, antara lain peningkatan kapasitas aparatur Kampung, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan Kampung.

4.2 Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung

Transparansi keuangan Kampung merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang baik (*good governance*). Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran Kampung, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah Kampung dalam memberikan akses informasi yang mudah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam perspektif kinerja perangkat Kampung, transparansi keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur Kampung dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan Kampung mulai dari perencanaan, penyusunan APBDes, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Perangkat Kampung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diketahui oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan di Kampung Atibo telah diwujudkan melalui berbagai bentuk keterbukaan informasi, seperti pelaksanaan musyawarah kampung, pemasangan baliho APBDes, penyediaan papan informasi Kampung, serta penyampaian laporan realisasi anggaran kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kampung telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung.

Selain aspek keterbukaan informasi, kinerja perangkat Kampung juga tercermin dari kualitas administrasi keuangan yang semakin tertib, koordinasi antarperangkat Kampung yang berjalan dengan baik, serta kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur Kampung memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan kompetensi sebagian aparatur Kampung, perubahan regulasi yang cukup dinamis, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti musyawarah maupun melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Kampung.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dipahami bahwa transparansi keuangan Kampung tidak hanya bergantung pada tersedianya informasi publik, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kinerja perangkat Kampung yang meliputi kompetensi, tanggung jawab, integritas, koordinasi, serta kemampuan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Semakin baik kinerja perangkat Kampung, maka semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung.

4.3 Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni

Kampung Atibo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu Kampung yang secara rutin menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya dana yang dikelola menuntut pemerintah Kampung untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan Kampung.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan informan, diketahui bahwa pemerintah Kampung Atibo telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi keuangan Kampung, antara lain melalui penyelenggaraan musyawarah kampung, publikasi APBDes, pemasangan baliho anggaran, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Kampung masih belum merata. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme penyusunan APBDes maupun realisasi penggunaan anggaran sehingga masih terdapat persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung.

Kedua, kualitas sumber daya manusia aparatur Kampung masih memerlukan peningkatan. Walaupun sebagian besar perangkat Kampung telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, perubahan regulasi yang terus berkembang mengharuskan aparatur Kampung untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Kampung.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi publik masih belum optimal. Informasi keuangan Kampung masih didominasi melalui media konvensional seperti baliho dan papan informasi, sedangkan penggunaan media digital masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan akses informasi bagi sebagian masyarakat belum maksimal.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana Kampung masih perlu ditingkatkan. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah kampung belum sepenuhnya mewakili seluruh unsur masyarakat sehingga pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal.

Meskipun terdapat berbagai kendala tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Atibo memiliki komitmen yang cukup kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan Kampung yang transparan. Hal ini didukung oleh pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan

Kampung (BPD), serta meningkatnya kesadaran aparat Kampung mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana Kampung.

Dengan demikian, kasus di Kampung Atibo menggambarkan bahwa transparansi keuangan Kampung merupakan suatu proses yang terus berkembang. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah Kampung, perangkat Kampung, DPMK, BPD, dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan Kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.4 Latar Belakang dan Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pembinaan, pengawasan, administrasi, dan pengelolaan pemerintahan Kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Informan terdiri atas pejabat struktural dan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni yang memahami implementasi transparansi keuangan Kampung, khususnya di Kampung Atibo, Distrik Manimeri.

Sebanyak **11 informan** diwawancarai dalam penelitian ini. Latar belakang masing-masing informan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	Nina	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	17 Tahun	2 Mei 2026	Memahami administrasi kelembagaan dan pembinaan aparatur Kampung.
2	Agus Wiratno, S.E.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	9 Tahun	3 Mei 2026	Bertanggung jawab terhadap pembinaan administrasi pemerintahan kampung.

No.	Nama Informan	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja	Tanggal Wawancara	Keterangan
3	Manasep Orocomna, S.E., M.Si.	Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	17 Tahun	4 Mei 2026	Memiliki tugas melakukan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
4	Yosina Agia, S.E.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	5 Tahun	5 Mei 2026	Bertugas membina kelembagaan dan tata kelola pemerintahan kampung.
5	Dr. Drs. Haris, M.Si.	Kepala Dinas	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	7 Tahun	6 Mei 2026	Penanggung jawab kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan Kampung.
6	Zet Apolos Orocomna, S.IP.	Sekretaris Dinas	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	4 Tahun	7 Mei 2026	Mengoordinasikan administrasi, perencanaan, dan pelayanan internal DPMK.
7	Agustinus Asmorom, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	13 Tahun	8 Mei 2026	Mengelola perencanaan program serta administrasi keuangan DPMK.
8	Felix Yerkohok, S.H.	Kepala Seksi Pengembangan Keswadayaan Masyarakat	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	9 Tahun	9 Mei 2026	Membina pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung.
9	Budiman, A.Md.Kom.	Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	13 Tahun	10 Mei 2026	Membantu administrasi pemerintahan kampung dan monitoring pelaksanaan administrasi Kampung.

No.	Nama Informan	Jabatan	Instansi	Lama Bekerja	Tanggal Wawancara	Keterangan
10	Mujianto, S.Kom.	Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	8 Tahun	11 Mei 2026	Membantu pengelolaan administrasi pemerintahan kampung serta pengolahan data Kampung.
11	Wahyudin Azis	Staf Administrasi Pemerintahan Kampung	DPMK Kabupaten Teluk Bintuni	18 Tahun	12 Mei 2026	Berpengalaman dalam administrasi pemerintahan kampung dan pembinaan administrasi Kampung.

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026.

Analisis Karakteristik Informan

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa seluruh informan berasal dari **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni**, yaitu instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pemberdayaan pemerintahan kampung. Komposisi informan terdiri atas **1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 1 Kepala Bidang, 3 Kepala Seksi, 1 Kepala Subbagian, dan 4 orang staf**, sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai transparansi keuangan Kampung.

Dari aspek pengalaman kerja, informan memiliki masa kerja antara **4 hingga 18 tahun**, dengan rata-rata pengalaman lebih dari **10 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informan telah memiliki pengalaman yang memadai dalam memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kampung, khususnya terkait pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan Kampung, dan implementasi prinsip transparansi.

Keberagaman jabatan dan pengalaman kerja tersebut memberikan kekuatan pada penelitian karena data yang diperoleh berasal dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana pembinaan, pengawas, hingga pelaksana administrasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu menggambarkan secara menyeluruh kondisi **transparansi keuangan Kampung Atibo dalam perspektif kinerja perangkat Kampung**.

HASIL WAWANCARA INFORMAN 1

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Nina

Jabatan Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 17 Tahun

Tanggal
Wawancara 2 Mei 2026

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Nina, Staf Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya mendukung pembinaan administrasi pemerintahan Kampung, termasuk memfasilitasi pengelolaan administrasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya berperan memberikan pembinaan administrasi, pendampingan, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes umumnya disampaikan melalui musyawarah Kampung dan pemasangan baliho APBDes.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan antara lain papan informasi Kampung, baliho, serta pertemuan masyarakat.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Secara umum cukup mudah, meskipun masih ada masyarakat yang kurang aktif mencari informasi.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat mengajukan permohonan langsung kepada pemerintah Kampung atau melalui forum musyawarah Kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan dapat diakses sesuai ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran dalam musyawarah Kampung dan melalui media informasi Kampung.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Biasanya dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah cukup baik, walaupun masih memerlukan peningkatan ketelitian administrasi.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar sudah mengikuti prosedur sesuai regulasi pengelolaan keuangan Kampung.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuannya cukup baik, namun masih perlu peningkatan melalui pelatihan secara berkala.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung beberapa kali mengikuti pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmennya cukup tinggi karena mereka memahami pentingnya akuntabilitas kepada masyarakat.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin dan komunikasi antarperangkat Kampung dalam setiap tahapan kegiatan.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung umumnya memberikan penjelasan dan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Sebagian besar masyarakat merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Komitmen kepala Kampung, kerja sama perangkat Kampung, serta adanya regulasi yang jelas.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pelaksanaan, BPD melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah dan pengawasan.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala utama adalah keterbatasan kemampuan administrasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan transparansi keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kapasitas perangkat Kampung, pemanfaatan teknologi informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kapasitas SDM, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan evaluasi.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Saya berharap pemerintah Kampung terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pembangunan Kampung berjalan lebih baik.

WAWANCARA INFORMAN 2

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Agus Wiratno, S.E.

Jabatan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 9 Tahun

Tanggal 3 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Agus Wiratno, S.E., Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Saya bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk pengelolaan administrasi dan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya mengoordinasikan pembinaan kepada pemerintah kampung, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBDes, serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan Kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes disampaikan melalui musyawarah kampung, papan informasi, dan baliho anggaran.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan meliputi baliho APBDes, papan pengumuman, dan forum musyawarah kampung.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Pada umumnya mudah, terutama bagi masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada pemerintah Kampung sesuai mekanisme pelayanan informasi yang berlaku.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan dapat diakses sebagai bentuk keterbukaan publik dengan tetap mengikuti ketentuan administrasi.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan realisasi APBDes, musyawarah kampung, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai tahapan pelaksanaan anggaran dan pada akhir tahun anggaran.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah baik, namun masih perlu peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan pelaporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar sudah bekerja sesuai regulasi, meskipun masih memerlukan pembinaan secara berkelanjutan.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan mereka cukup memadai, tetapi peningkatan kompetensi tetap diperlukan karena regulasi terus berkembang.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara berkala mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmennya cukup baik dan terus didorong melalui pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan komunikasi antarperangkat Kampung.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung umumnya memberikan informasi secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Berdasarkan hasil monitoring kami, sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Adanya komitmen kepala Kampung, kompetensi perangkat Kampung, pembinaan DPMK, dan partisipasi masyarakat.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pelaksanaan, BPD melakukan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kapasitas aparatur Kampung, optimalisasi sistem informasi Kampung, serta penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh informasi.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Secara umum transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Perlu memperkuat kompetensi perangkat Kampung, meningkatkan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan Kampung.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah Kampung, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar pengelolaan dana Kampung semakin akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kampung Atibo.

WAWANCARA INFORMAN 3

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Manasep Orocomna, S.E., M.Si.

Jabatan Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 17 Tahun

Tanggal
Wawancara 4 Mei 2026

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Manasep Orocomna, S.E., M.Si., Kepala Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk pengelolaan keuangan Kampung agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya melakukan monitoring terhadap setiap tahapan pengelolaan keuangan Kampung, memberikan pembinaan apabila ditemukan kekurangan, serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Pemerintah Kampung menyampaikan APBDes melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi yang dapat dilihat masyarakat.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan berupa papan pengumuman, baliho APBDes, dan forum pertemuan dengan masyarakat.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Pada prinsipnya mudah, selama masyarakat mengajukan permintaan informasi melalui pemerintah Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi secara langsung kepada pemerintah Kampung atau melalui forum musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan dapat diakses sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi APBDes dan forum pertanggungjawaban kepada masyarakat.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan semester dan laporan akhir tahun anggaran.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kekurangan administrasi yang perlu diperbaiki.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar sudah mengikuti ketentuan, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar pelaksanaannya konsisten.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung cukup baik, namun peningkatan kompetensi masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, pemerintah daerah secara rutin memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat Kampung.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup baik, terutama dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pelaporan keuangan.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat internal, konsultasi dengan DPMK, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung umumnya memberikan informasi dengan baik selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Sebagian besar masyarakat memberikan respon positif terhadap pelayanan informasi yang diberikan pemerintah Kampung.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Komitmen pemerintah Kampung, pengawasan dari DPMK dan BPD, serta adanya regulasi yang jelas menjadi faktor utama pendukung transparansi.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung bertanggung jawab atas pelaksanaan, BPD mengawasi jalannya pemerintahan Kampung, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui musyawarah dan pengawasan sosial.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala utama adalah keterbatasan kapasitas aparatur, perubahan regulasi, dan administrasi yang belum sepenuhnya tertib.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga aspek tersebut masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara bertahap.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih perlu peningkatan terutama dalam kualitas administrasi, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat kompetensi perangkat Kampung, mengoptimalkan pengawasan, dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Transparansi keuangan Kampung akan berjalan optimal apabila didukung oleh integritas perangkat Kampung, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung.

WAWANCARA INFORMAN 4

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Yosina Agia, S.E.

Jabatan Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Kampung

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 5 Tahun

Tanggal 5 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Yosina Agia, S.E., Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan kampung, meningkatkan kapasitas aparatur Kampung, serta mendukung penerapan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kampung yang baik.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya berperan memberikan pembinaan kepada aparatur kampung, melakukan pendampingan administrasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes disampaikan melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi Kampung.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan berupa baliho APBDes, papan pengumuman, serta forum musyawarah dengan masyarakat.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Ya, masyarakat cukup mudah memperoleh informasi apabila aktif mengikuti kegiatan dan berkomunikasi dengan pemerintah Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi secara langsung kepada pemerintah Kampung atau melalui forum musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan dapat diakses sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat melalui musyawarah kampung dan media informasi Kampung.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan semester dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum kualitas administrasi sudah cukup baik, walaupun masih memerlukan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen dan pelaporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar sudah bekerja sesuai prosedur dan selalu mendapatkan pembinaan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan aparatur Kampung sudah cukup memadai, tetapi peningkatan kompetensi tetap diperlukan melalui pelatihan secara berkelanjutan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara rutin mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen mereka cukup baik karena memahami bahwa transparansi merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, konsultasi internal, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan informasi secara terbuka dan menjelaskan sesuai kebutuhan masyarakat.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Menurut hasil pembinaan dan evaluasi, masyarakat pada umumnya merasa cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Komitmen kepala Kampung, kemampuan perangkat Kampung, pembinaan dari DPMK, serta dukungan masyarakat merupakan faktor utama yang mendukung transparansi.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksanaan, BPD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui musyawarah dan pengawasan terhadap pembangunan Kampung.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang sering ditemui adalah keterbatasan kemampuan administrasi, perubahan regulasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, keterbatasan SDM, fasilitas pendukung, dan pemahaman sebagian masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu meningkatkan kapasitas aparatur Kampung, memperkuat pembinaan dan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah cukup baik dan mengalami perkembangan positif, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kampung.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu terus meningkatkan kualitas SDM, memperkuat sistem pengawasan, mengoptimalkan keterbukaan informasi, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan Kampung.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Saya berharap seluruh perangkat Kampung terus menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan Kampung semakin transparan, efektif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kampung.

WAWANCARA INFORMAN 5

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Dr. Drs. Haris, M.Si.

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 7 Tahun

Tanggal
Wawancara 6 Mei 2026

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Dr. Drs. Haris, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, termasuk pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya bertanggung jawab menetapkan kebijakan pembinaan, mengarahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung, melakukan evaluasi, serta memastikan seluruh pemerintah Kampung melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Pemerintah Kampung menyampaikan APBDes melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, papan informasi, dan forum pertemuan dengan masyarakat.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan antara lain baliho APBDes, papan pengumuman Kampung, media sosial Kampung apabila tersedia, dan forum musyawarah.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Secara umum masyarakat sudah cukup mudah memperoleh informasi, walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi kepada pemerintah Kampung sesuai mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung bersifat terbuka sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Kampung.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi APBDes, musyawarah pertanggungjawaban, serta penyajian informasi kepada masyarakat.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan semester, akhir tahun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah baik dan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa Kampung yang memerlukan pembinaan lebih lanjut.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar telah bekerja sesuai regulasi, didukung dengan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan aparatur Kampung semakin baik, namun peningkatan kompetensi harus terus dilakukan karena regulasi dan sistem pengelolaan keuangan selalu berkembang.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, DPMK secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan bagi pemerintah Kampung.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup tinggi karena transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan Kampung yang baik.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat internal, konsultasi dengan DPMK, pendamping Kampung, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung pada umumnya memberikan pelayanan yang terbuka, cepat, dan sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi kami, sebagian besar masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan informasi pemerintah Kampung.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Faktor utama adalah komitmen kepala Kampung, kompetensi aparatur, sistem pengawasan yang baik, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pengelolaan keuangan, BPD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Kampung.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM, perubahan regulasi, akses teknologi informasi, dan kondisi geografis beberapa wilayah.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga aspek tersebut masih menjadi tantangan sehingga diperlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kapasitas aparatur Kampung, digitalisasi pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berada pada arah yang baik. Pemerintah Kampung telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, namun kualitas pelayanan informasi dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan Kampung semakin baik.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, memanfaatkan teknologi informasi, memperluas akses informasi publik, serta memperkuat pengawasan oleh BPD dan masyarakat agar kepercayaan publik semakin meningkat.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Transparansi keuangan Kampung merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah Kampung, DPMK, BPD, pendamping Kampung, maupun masyarakat, harus bekerja sama membangun budaya akuntabilitas sehingga dana Kampung benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kampung Atibo.

WAWANCARA INFORMAN 6

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Zet Apolos Orocomna, S.IP.

Jabatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 4 Tahun

Tanggal 7 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Zet Apolos Orocomna, S.IP., Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya mengoordinasikan administrasi, perencanaan program, serta mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk tata kelola pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan, memfasilitasi evaluasi administrasi keuangan Kampung, serta memastikan setiap kegiatan pembinaan berjalan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes disampaikan melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi Kampung agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan berupa baliho APBDes, papan pengumuman, rapat kampung, dan media komunikasi yang tersedia di Kampung.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Secara umum masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah apabila memanfaatkan saluran informasi yang telah disediakan pemerintah Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah Kampung atau memperoleh informasi melalui forum musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung dapat diakses sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi APBDes melalui musyawarah kampung dan laporan pertanggungjawaban tahunan.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penyusunan laporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar telah bekerja sesuai prosedur, didukung dengan pembinaan dan pendampingan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung sudah cukup baik, tetapi peningkatan kompetensi harus terus dilakukan melalui pelatihan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara rutin mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan pengelolaan keuangan Kampung.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup baik karena mereka memahami bahwa transparansi merupakan bagian penting dari pelayanan publik.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, evaluasi bersama, dan komunikasi yang intensif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan pelayanan secara terbuka dan berusaha memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai aturan.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Berdasarkan evaluasi kami, sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik dan responsif.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah Kampung, pembinaan dari DPMK, regulasi yang jelas, dan partisipasi masyarakat.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pengelolaan keuangan, BPD melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan melalui musyawarah.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan SDM, perubahan regulasi, serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kapasitas aparatur Kampung, penguatan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan publik.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kampung telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan, namun kualitas penyampaian informasi dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan internal, memanfaatkan teknologi informasi, serta membuka akses informasi yang lebih luas agar masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan keuangan Kampung.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Transparansi keuangan Kampung harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur Kampung. Dengan integritas, profesionalisme, pembinaan yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan Kampung akan semakin akuntabel serta mampu mendukung pembangunan Kampung Atibo secara berkelanjutan.

WAWANCARA INFORMAN 7

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Agustinus Asmorom, S.E.

Jabatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 13 Tahun

Tanggal 8 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Agustinus Asmorom, S.E., Kasubbag Perencanaan dan Keuangan DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya menyusun perencanaan program, mengelola administrasi keuangan dinas, serta mendukung pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan Kampung agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya berperan dalam penyusunan program pembinaan, evaluasi administrasi keuangan Kampung, serta monitoring terhadap pelaporan keuangan Kampung yang disampaikan kepada DPMK.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Pemerintah Kampung menyampaikan APBDes melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi yang dipasang di tempat umum.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan adalah baliho APBDes, papan pengumuman, rapat kampung, dan penyampaian langsung kepada masyarakat dalam musyawarah.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Ya, masyarakat cukup mudah memperoleh informasi, meskipun tingkat pemanfaatannya masih berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi secara langsung kepada pemerintah Kampung atau melalui forum musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung terbuka bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan realisasi APBDes, musyawarah pertanggungjawaban, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala setiap semester dan pada akhir tahun anggaran.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah baik, namun masih perlu peningkatan dalam ketelitian administrasi dan ketepatan waktu pelaporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Sebagian besar telah bekerja sesuai prosedur dan selalu mendapat pembinaan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan mereka cukup baik, namun peningkatan kompetensi tetap diperlukan mengikuti perkembangan regulasi dan aplikasi pengelolaan keuangan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara rutin mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup tinggi karena transparansi menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan Kampung.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi kegiatan, serta komunikasi intensif antara kepala Kampung, perangkat Kampung, dan DPMK.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah baik, walaupun masih perlu peningkatan dalam kecepatan penyampaian informasi.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Komitmen pemerintah Kampung, kemampuan aparatur, pembinaan dari DPMK, serta dukungan regulasi menjadi faktor utama pendukung transparansi.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pengelolaan keuangan, BPD melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui musyawarah dan pengawasan sosial.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala utama adalah keterbatasan SDM, perubahan regulasi, keterbatasan sarana pendukung, dan administrasi yang belum sepenuhnya optimal.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, faktor SDM, sarana, dan tingkat pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu peningkatan kompetensi aparatur Kampung, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Kampung telah melaksanakan prinsip keterbukaan, namun kualitas administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Perlu peningkatan kapasitas perangkat Kampung, penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta penyampaian informasi yang lebih terbuka agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Transparansi keuangan Kampung harus didukung oleh integritas aparatur, pengelolaan administrasi yang tertib, serta kerja sama antara pemerintah Kampung, DPMK, BPD, dan masyarakat agar pengelolaan dana Kampung semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

WAWANCARA INFORMAN 8

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Felix Yerkohok, S.H.

Jabatan Kepala Seksi Pengembangan Keswadayaan Masyarakat

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 9 Tahun

Tanggal 9 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Felix Yerkohok, S.H., Kepala Seksi Pengembangan Keswadayaan Masyarakat pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya membina dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung, termasuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya berperan mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah Kampung, memberikan pembinaan mengenai pentingnya transparansi, serta memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program yang dibiayai dana Kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes disampaikan melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, papan informasi, dan penyampaian langsung kepada masyarakat.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan berupa baliho APBDes, papan pengumuman, rapat kampung, dan media komunikasi yang tersedia di Kampung.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Secara umum masyarakat cukup mudah memperoleh informasi, namun partisipasi masyarakat dalam mencari informasi masih perlu ditingkatkan.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada pemerintah Kampung atau menyampaikannya melalui forum musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung dapat diakses sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi APBDes melalui musyawarah kampung dan media informasi Kampung.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan semester dan laporan akhir tahun.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah cukup baik, terutama dalam penyusunan administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Ya, perangkat Kampung pada umumnya telah bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung sudah cukup baik, namun peningkatan kapasitas tetap diperlukan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara rutin mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup baik karena mereka menyadari bahwa transparansi merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, musyawarah internal, serta evaluasi pelaksanaan program secara berkala.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung umumnya memberikan informasi dengan baik dan menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik, meskipun komunikasi dengan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Faktor pendukung utamanya adalah komitmen kepala Kampung, partisipasi masyarakat, pembinaan dari DPMK, dan kerja sama antarperangkat Kampung.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pelaksanaan, BPD menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan melalui musyawarah kampung.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga faktor tersebut masih memengaruhi efektivitas transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu meningkatkan kapasitas aparatur Kampung, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan, dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media keterbukaan.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah cukup baik. Pemerintah Kampung telah menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan dana Kampung, namun partisipasi masyarakat dan kualitas penyampaian informasi masih perlu terus ditingkatkan.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kapasitas perangkat Kampung, memperluas pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi dengan BPD dan DPMK.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Keberhasilan transparansi keuangan Kampung tidak hanya bergantung pada pemerintah Kampung, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Semakin tinggi kepedulian masyarakat dalam mengawasi pembangunan, semakin baik pula tata kelola keuangan Kampung dan hasil pembangunan yang dirasakan bersama.

WAWANCARA INFORMAN 9

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Budiman, A.Md.Kom.

Jabatan Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 13 Tahun

Tanggal
Wawancara 10 Mei 2026

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Budiman, A.Md.Kom., Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya membantu administrasi pemerintahan kampung, menghimpun data, melakukan monitoring administrasi Kampung, serta mendukung pembinaan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya membantu pengumpulan data administrasi, melakukan verifikasi dokumen, serta mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Informasi APBDes disampaikan melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi Kampung.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan adalah baliho APBDes, papan pengumuman, dan pertemuan bersama masyarakat.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Ya, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah apabila mengajukan permintaan kepada pemerintah Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada pemerintah Kampung atau melalui musyawarah kampung.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung tersedia dan dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi APBDes melalui musyawarah kampung dan papan informasi.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala sesuai jadwal pelaporan semester dan tahunan.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan dalam ketepatan administrasi dan pelaporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Ya, perangkat Kampung pada umumnya telah bekerja sesuai prosedur dan mendapatkan pembinaan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung cukup baik, namun pelatihan yang berkelanjutan tetap diperlukan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung rutin mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Perangkat Kampung memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas secara terbuka dan bertanggung jawab.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, konsultasi, dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan penjelasan secara terbuka sesuai dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Menurut pengamatan saya, sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik dan responsif.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Komitmen pemerintah Kampung, pembinaan DPMK, regulasi yang jelas, serta kerja sama antarperangkat Kampung menjadi faktor utama pendukung.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung mengoordinasikan pelaksanaan, BPD melakukan pengawasan, dan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah serta pengawasan pembangunan.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, administrasi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi sebagian masyarakat.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu meningkatkan kompetensi aparatur Kampung, memperbaiki sistem administrasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah cukup baik. Pemerintah Kampung telah melaksanakan keterbukaan informasi, namun masih diperlukan peningkatan kualitas administrasi dan partisipasi masyarakat agar transparansi semakin optimal.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Perlu meningkatkan kapasitas perangkat Kampung, memperkuat sistem pengawasan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat secara terbuka.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Saya berharap pemerintah Kampung terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan Kampung. Dengan dukungan masyarakat dan pembinaan yang berkelanjutan dari DPMK, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Kampung akan semakin baik sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kampung Atibo.

WAWANCARA INFORMAN 10

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Mujianto, S.Kom.

Jabatan Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Instansi Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 8 Tahun

Tanggal 11 Mei 2026
Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Mujianto, S.Kom., Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas saya membantu administrasi pemerintahan kampung, mengelola data, mendukung monitoring administrasi Kampung, serta membantu pembinaan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya membantu pengolahan data administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, serta mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Pemerintah Kampung menyampaikan informasi APBDes melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, dan papan informasi Kampung.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan berupa baliho APBDes, papan pengumuman, dan forum musyawarah kampung.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Secara umum masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah apabila aktif mengikuti kegiatan Kampung.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi secara langsung kepada pemerintah Kampung sesuai prosedur yang berlaku.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung dapat diakses sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi APBDes dalam musyawarah kampung dan papan informasi Kampung.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala setiap semester dan pada akhir tahun anggaran.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah baik, namun masih perlu peningkatan dalam ketepatan administrasi dan penyusunan laporan.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Ya, perangkat Kampung telah bekerja sesuai prosedur dan selalu mendapatkan pembinaan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung cukup baik, namun peningkatan kompetensi perlu terus dilakukan agar mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, perangkat Kampung secara rutin mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Perangkat Kampung memiliki komitmen yang baik untuk melaksanakan tugas secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan informasi secara terbuka dan menjelaskan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Menurut pengamatan saya, sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik dan informatif.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Faktor pendukung utamanya adalah komitmen pemerintah Kampung, pembinaan DPMK, regulasi yang jelas, serta kerja sama antarperangkat Kampung.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pelaksanaan pengelolaan keuangan, BPD melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat memberikan masukan dan ikut mengawasi pembangunan Kampung.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan SDM, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, faktor-faktor tersebut masih memengaruhi kualitas transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu meningkatkan kompetensi aparatur Kampung, mengembangkan sistem informasi yang lebih baik, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Kampung telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat, namun masih perlu peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas administrasi.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, memperkuat sistem pengawasan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan Kampung.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Saya berharap transparansi keuangan Kampung terus menjadi budaya kerja seluruh aparatur Kampung. Dengan administrasi yang tertib, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan dana Kampung akan semakin akuntabel dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kampung Atibo.

WAWANCARA INFORMAN 11

A. Identitas Informan

Nama Lengkap Wahyudin Azis

Jabatan Staf Administrasi Pemerintahan Kampung

Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
Kabupaten Teluk Bintuni

Lama Bekerja 18 Tahun

Tanggal 12 Mei 2026

Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.

Perkenalkan, saya Wahyudin Azis, Staf Administrasi Pemerintahan Kampung pada DPMK Kabupaten Teluk Bintuni. Selama 18 tahun saya bertugas membantu administrasi pemerintahan kampung, mengelola dokumen pemerintahan Kampung, melakukan monitoring administrasi, serta mendukung pembinaan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

Saya membantu menyiapkan administrasi, memverifikasi kelengkapan dokumen, mengolah data, serta mendukung monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan Kampung.

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?

Pemerintah Kampung menyampaikan informasi APBDes melalui musyawarah kampung, baliho anggaran, serta papan informasi yang dipasang di kantor Kampung.

2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?

Media yang digunakan antara lain papan pengumuman, baliho APBDes, rapat kampung, dan penyampaian langsung kepada masyarakat.

3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Ya, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah apabila aktif mengikuti kegiatan Kampung atau mengajukan permintaan informasi.

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

Masyarakat dapat meminta informasi langsung kepada pemerintah Kampung sesuai mekanisme pelayanan informasi yang berlaku.

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Ya, laporan keuangan Kampung dapat diakses sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik.

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?

Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyampaian laporan realisasi APBDes dalam musyawarah kampung dan melalui media informasi Kampung.

7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

Laporan disampaikan secara berkala setiap semester dan pada akhir tahun anggaran sesuai ketentuan.

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?

Secara umum sudah baik dan semakin tertib, walaupun masih diperlukan peningkatan dalam ketepatan penyusunan administrasi.

9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Ya, perangkat Kampung telah bekerja sesuai prosedur dan terus mendapatkan pembinaan dari DPMK.

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?

Kemampuan perangkat Kampung sudah cukup baik, namun pelatihan tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Ya, pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur Kampung.

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?

Komitmen perangkat Kampung cukup baik karena mereka memahami bahwa keterbukaan merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi berkala, dan komunikasi yang baik antarperangkat Kampung.

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?

Perangkat Kampung memberikan informasi secara terbuka dan menjelaskan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

Sebagian besar masyarakat merasa pelayanan sudah cukup baik, walaupun masih ada yang mengharapkan informasi disampaikan lebih cepat.

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah Kampung, pembinaan dari DPMK, regulasi yang jelas, dan kerja sama yang baik antarperangkat Kampung.

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Kepala Kampung memimpin pengelolaan keuangan, BPD mengawasi pelaksanaannya, sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi melalui musyawarah dan pengawasan pembangunan.

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan SDM, perubahan regulasi, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pengelolaan dana Kampung.

19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?

Ya, ketiga faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

Perlu meningkatkan kompetensi aparatur Kampung, memperkuat pembinaan dan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?

Menurut saya, transparansi keuangan Kampung Atibo sudah cukup baik. Informasi keuangan Kampung sudah disampaikan kepada masyarakat, namun kualitas administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?

Pemerintah Kampung perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem pengawasan, memperluas akses informasi publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan Kampung.

3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?

Dengan pengalaman saya selama 18 tahun di bidang administrasi pemerintahan kampung, saya melihat bahwa transparansi yang didukung oleh administrasi yang tertib, integritas aparatur, serta partisipasi masyarakat merupakan kunci terciptanya tata kelola keuangan Kampung yang akuntabel. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan Kampung Atibo semakin baik.

4.5 Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap **11 informan** yang terdiri atas Kepala Dinas DPMK, Sekretaris DPMK, para kepala bidang, kepala seksi, kepala subbagian, dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni. Kesebelas informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan administrasi pemerintahan kampung, sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif

mengenai **transparansi keuangan Kampung Atibo dalam perspektif kinerja perangkat Kampung**. Analisis dilakukan berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat transparansi, kinerja perangkat Kampung, serta faktor-faktor yang memengaruhi transparansi keuangan Kampung.

4.5.1 Tingkat Transparansi Keuangan Kampung Atibo

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, diperoleh kesamaan pandangan bahwa **transparansi pengelolaan keuangan Kampung Atibo telah berjalan dengan cukup baik**, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kampung Atibo telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat dalam berbagai bentuk.

Seluruh informan menjelaskan bahwa informasi mengenai **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes)** disampaikan melalui beberapa media, antara lain:

- Musyawarah Kampung (Muskam);
- Baliho APBDes;
- Papan informasi Kampung;
- Pertemuan bersama masyarakat.

Media tersebut dinilai cukup efektif sebagai sarana penyampaian informasi mengenai perencanaan maupun realisasi penggunaan dana Kampung. Keberadaan baliho APBDes di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kampung untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.

Namun demikian, sebagian besar informan juga menyampaikan bahwa **tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat belum optimal**. Tidak semua masyarakat secara aktif mengikuti musyawarah kampung ataupun membaca informasi yang dipublikasikan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai penggunaan dana Kampung.

Dari aspek **akses informasi publik**, seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan memperoleh informasi keuangan Kampung dengan mengajukan permintaan kepada pemerintah Kampung sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah Kampung pada prinsipnya memberikan akses terhadap laporan keuangan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pada aspek **akuntabilitas**, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Atibo telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Kampung secara berkala melalui musyawarah kampung maupun laporan realisasi APBDes. Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kampung.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa **transparansi keuangan Kampung Atibo telah terlaksana dengan cukup baik**, ditandai dengan adanya keterbukaan informasi, akses masyarakat terhadap informasi keuangan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan dana Kampung. Namun demikian, kualitas transparansi masih memerlukan peningkatan terutama dalam memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

4.5.2 Kinerja Perangkat Kampung dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban seluruh informan, diperoleh gambaran bahwa **kinerja perangkat Kampung berperan penting dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan Kampung Atibo**.

Pada aspek **kualitas kerja**, para informan menilai bahwa perangkat Kampung telah melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dengan cukup baik. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan telah disusun sesuai prosedur yang berlaku. Walaupun demikian, beberapa informan masih menemukan adanya kekurangan dalam ketelitian administrasi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan.

Dari aspek **kompetensi**, seluruh informan menyampaikan bahwa kemampuan perangkat Kampung dalam mengelola keuangan sudah cukup memadai. Hal tersebut didukung oleh berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), serta pendampingan yang secara rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui DPMK. Meskipun demikian, para informan juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur Kampung harus terus dilakukan mengingat regulasi pengelolaan keuangan Kampung terus mengalami perkembangan.

Pada aspek **tanggung jawab**, seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa perangkat Kampung menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan administrasi

yang semakin tertib, koordinasi antarperangkat Kampung yang berjalan dengan baik, serta kesediaan memberikan informasi kepada masyarakat apabila dibutuhkan.

Sementara itu, pada aspek **pelayanan kepada masyarakat**, mayoritas informan menyatakan bahwa perangkat Kampung telah memberikan pelayanan informasi secara terbuka. Apabila masyarakat meminta penjelasan mengenai penggunaan dana Kampung, perangkat Kampung pada umumnya memberikan informasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan positif menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa **kinerja perangkat Kampung di Kampung Atibo telah mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung**, walaupun masih memerlukan peningkatan kualitas administrasi, kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi.

4.5.3 Faktor Pendukung Transparansi Keuangan Kampung

Hasil wawancara terhadap seluruh informan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendukung terlaksananya transparansi keuangan Kampung Atibo.

Faktor pertama adalah **komitmen kepala Kampung dan perangkat Kampung** dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh informan menyatakan bahwa kepemimpinan kepala Kampung memiliki pengaruh besar terhadap keterbukaan informasi dan tertib administrasi keuangan.

Faktor kedua adalah **dukungan regulasi** yang memberikan pedoman jelas mengenai pengelolaan keuangan Kampung sehingga perangkat Kampung memiliki acuan dalam melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Faktor ketiga adalah **pembinaan dan pendampingan dari DPMK Kabupaten Teluk Bintuni**. Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis dinilai sangat membantu meningkatkan kemampuan aparatur Kampung dalam mengelola keuangan secara transparan.

Faktor berikutnya adalah **fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD)** yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan Kampung serta memastikan penggunaan dana Kampung berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, **partisipasi masyarakat** juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang aktif mengikuti musyawarah Kampung dan mengawasi pembangunan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kampung.

4.5.4 Faktor Penghambat Transparansi Keuangan Kampung

Walaupun transparansi telah berjalan cukup baik, seluruh informan mengakui bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hambatan pertama adalah **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)** aparatur Kampung. Tidak semua perangkat Kampung memiliki kemampuan administrasi dan penguasaan teknologi informasi yang sama sehingga kualitas pengelolaan keuangan masih bervariasi.

Hambatan kedua adalah **perubahan regulasi** yang relatif cepat sehingga perangkat Kampung memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan baru.

Hambatan ketiga adalah **keterbatasan sarana dan prasarana**, khususnya fasilitas teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan administrasi keuangan secara digital.

Selain itu, sebagian besar informan juga menyampaikan bahwa **partisipasi masyarakat masih belum optimal**. Tidak semua masyarakat mengikuti musyawarah Kampung atau memanfaatkan informasi yang telah disediakan pemerintah Kampung sehingga pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana Kampung belum maksimal.

4.5.5 Hasil Analisis gabungan

Berdasarkan hasil analisis gabungan terhadap sebelas informan dapat disimpulkan bahwa **transparansi keuangan Kampung Atibo telah berjalan pada kategori cukup baik**. Pemerintah Kampung telah menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyampaian informasi APBDes, pelaksanaan musyawarah Kampung, penyediaan papan informasi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Kampung.

Kinerja perangkat Kampung juga menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini terlihat dari kualitas administrasi yang semakin baik, meningkatnya kompetensi aparatur melalui pelatihan, komitmen dalam menjaga akuntabilitas, serta pelayanan informasi kepada masyarakat yang semakin terbuka.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan transparansi masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu keterbatasan kompetensi SDM, perubahan

regulasi, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, transparansi keuangan Kampung akan semakin optimal apabila didukung oleh **penguatan kapasitas aparatur Kampung, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan yang efektif, dan peningkatan partisipasi masyarakat.**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa **kinerja perangkat Kampung merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan transparansi keuangan Kampung Atibo**, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan Kampung menjadi strategi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

4.6 Pembahasan

Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap **11 informan** yang terdiri atas Kepala Dinas DPMK, Sekretaris DPMK, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan hasil wawancara seluruh informan, kemudian membandingkannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan difokuskan pada tiga rumusan masalah penelitian, yaitu transparansi keuangan Kampung, kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat transparansi keuangan Kampung Atibo.

4.6.1 Transparansi Keuangan Kampung Atibo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki pandangan yang relatif sama mengenai kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo. Nina, Agus Wiratno, Manasep Orocomna, Yosina Agia, Dr. Drs. Haris, Zet Apolos Orocomna, Agustinus Asmorom, Felix Yerkohok, Budiman, Mujianto, dan Wahyudin Azis menyatakan bahwa pemerintah Kampung Atibo telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes) kepada masyarakat.

Menurut para informan, informasi mengenai APBDes disampaikan melalui berbagai media seperti musyawarah kampung, baliho APBDes, papan informasi Kampung, serta forum pertemuan masyarakat. Penyampaian informasi tersebut merupakan bentuk

implementasi keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat memiliki kesempatan mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi penggunaan dana Kampung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat pada prinsipnya memiliki akses terhadap informasi keuangan Kampung apabila mengajukan permintaan kepada pemerintah Kampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kampung telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak publik. Selain itu, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Kampung melalui musyawarah kampung menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah Kampung kepada masyarakat.

Meskipun demikian, seluruh informan mengakui bahwa transparansi belum berjalan secara sempurna. Beberapa masyarakat masih kurang aktif mengikuti musyawarah Kampung ataupun memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan pemerintah Kampung. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana Kampung belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada keterbukaan pemerintah Kampung, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori transparansi yang dikemukakan oleh **Mardiasmo (2018)** yang menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Semakin terbuka informasi yang diberikan pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian **Pratiwi dan Kurniawan (2022)** yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi melalui musyawarah Kampung dan publikasi APBDes merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa transparansi keuangan Kampung Atibo telah berada pada kategori **cukup baik**, namun masih memerlukan peningkatan kualitas penyampaian informasi agar seluruh masyarakat dapat memahami penggunaan dana Kampung secara lebih menyeluruh.

4.6.2 Kinerja Perangkat Kampung dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Kampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan menilai kinerja perangkat Kampung Atibo telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelaksanaan transparansi keuangan Kampung.

Menurut Nina, Budiman, Mujianto, dan Wahyudin Azis, administrasi pengelolaan keuangan Kampung telah berjalan semakin tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan yang telah mengikuti ketentuan pemerintah.

Agus Wiratno, Manasep Orocomna, dan Yosina Agia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas administrasi tersebut tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh DPMK Kabupaten Teluk Bintuni melalui kegiatan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Sementara itu, Kepala DPMK Dr. Drs. Haris, M.Si., menegaskan bahwa peningkatan kinerja perangkat Kampung merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena kualitas aparatur sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan Kampung. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sekretaris DPMK, Zet Apolos Orocomna, yang menyatakan bahwa koordinasi antarperangkat Kampung menjadi faktor penting dalam menciptakan administrasi yang tertib dan akuntabel.

Felix Yerkohok menambahkan bahwa komitmen aparatur Kampung dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya kerja menuju pemerintahan Kampung yang lebih terbuka.

Dari sisi kompetensi, seluruh informan menjelaskan bahwa perangkat Kampung telah mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan Kampung. Walaupun demikian, mereka sepakat bahwa peningkatan kapasitas aparatur masih harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat regulasi pengelolaan keuangan Kampung terus berkembang.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori **Mangkunegara (2017)** yang menjelaskan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Selain itu, hasil penelitian juga mendukung pendapat **Sedarmayanti (2018)** yang menyatakan bahwa kompetensi, koordinasi, disiplin, dan komitmen aparatur merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kinerja perangkat Kampung Atibo telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan transparansi keuangan Kampung, meskipun peningkatan kompetensi aparatur masih menjadi kebutuhan utama.

4.6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Keuangan Kampung

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sebelas informan diperoleh beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat transparansi keuangan Kampung Atibo.

Seluruh informan menyatakan bahwa faktor pendukung utama adalah **komitmen kepala Kampung dan seluruh perangkat Kampung** dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka. Kepemimpinan kepala Kampung dinilai sangat menentukan keberhasilan penerapan prinsip transparansi karena kepala Kampung berperan sebagai pengambil keputusan sekaligus penanggung jawab pengelolaan keuangan Kampung.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh DPMK Kabupaten Teluk Bintuni juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Seluruh informan menyampaikan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi, supervisi, serta bimbingan teknis membantu meningkatkan kemampuan aparatur Kampung dalam memahami regulasi dan menyusun administrasi keuangan.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan Kampung, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD), serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah Kampung.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat. Seluruh informan menyebutkan bahwa **keterbatasan kualitas sumber daya manusia** masih menjadi kendala utama. Tidak semua perangkat Kampung memiliki kemampuan administrasi maupun penguasaan teknologi informasi yang sama sehingga kualitas pengelolaan keuangan masih bervariasi.

Selain itu, perubahan regulasi yang cukup cepat sering kali membuat aparatur Kampung membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Keterbatasan sarana pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi administrasi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Kampung.

Hambatan lain yang paling sering diungkapkan informan adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti musyawarah kampung maupun melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Kampung. Akibatnya, prinsip transparansi belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena hubungan antara pemerintah Kampung dan masyarakat belum berlangsung secara maksimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori **Good Governance** yang dikemukakan oleh **UNDP (1997)**. Teori tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kapasitas kelembagaan.

Hasil penelitian juga mendukung penelitian **Sari, dkk. (2023)** yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan transparansi keuangan Kampung Atibo tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas kinerja perangkat Kampung, tetapi juga oleh komitmen pimpinan, dukungan regulasi, pembinaan pemerintah daerah, pengawasan BPD, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa **transparansi keuangan Kampung Atibo telah berjalan dengan cukup baik** dan didukung oleh **kinerja perangkat Kampung yang relatif baik**. Kesebelas informan memiliki pandangan yang konsisten bahwa pemerintah Kampung telah melaksanakan keterbukaan informasi melalui publikasi APBDes, musyawarah kampung, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap bahwa peningkatan transparansi masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia, perubahan regulasi, keterbatasan sarana pendukung, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Kampung, penguatan sistem pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat merupakan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Kampung yang semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip **good governance**.

4.7 Solusi dan Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung (Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)**, diketahui bahwa transparansi pengelolaan keuangan Kampung telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian agar tata kelola keuangan Kampung semakin transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip **good governance**. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang bersifat operasional sekaligus strategi pengembangan yang berkelanjutan.

4.7.1 Solusi Peningkatan Transparansi Keuangan Kampung

1. Peningkatan Kompetensi Perangkat Kampung

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan Kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perangkat Kampung sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memahami perubahan regulasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan Kampung.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkala;
- meningkatkan frekuensi bimbingan teknis (Bimtek);
- melaksanakan pendampingan langsung oleh DPMK dan tenaga pendamping profesional;
- memberikan pelatihan mengenai penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Kampung.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, aparatur Kampung diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel.

2. Penguatan Sistem Transparansi Informasi

Walaupun informasi APBDes telah dipublikasikan melalui baliho dan musyawarah Kampung, penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu diperluas agar lebih mudah diakses.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

- memperbarui papan informasi Kampung secara berkala;
- memasang baliho realisasi APBDes pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat;
- menyediakan ruang pelayanan informasi publik di kantor Kampung;
- memanfaatkan media sosial dan website Kampung sebagai media publikasi.

Melalui keterbukaan informasi yang lebih luas, masyarakat dapat mengetahui seluruh proses pengelolaan dana Kampung sehingga tingkat kepercayaan publik semakin meningkat.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Transparansi tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Oleh karena itu pemerintah Kampung perlu:

- meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan dana Kampung;
- mengaktifkan forum musyawarah kampung;
- memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran;
- melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda dalam pengawasan pembangunan Kampung.

Partisipasi masyarakat akan memperkuat mekanisme kontrol sosial sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

4. Penguatan Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan Kampung.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPD);
- memperkuat monitoring dan evaluasi oleh DPMK;

- meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah;
- melakukan evaluasi administrasi secara berkala.

Pengawasan yang efektif akan meningkatkan disiplin aparatur Kampung sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.

Pemerintah Kampung dapat:

- mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes);
- menerapkan arsip digital dokumen keuangan;
- menggunakan media digital sebagai sarana publikasi APBDes;
- meningkatkan kapasitas aparatur dalam penggunaan teknologi informasi.

Digitalisasi administrasi akan meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah pelaporan, dan memperkuat transparansi informasi kepada masyarakat.

4.7.2 Pengembangan Tata Kelola Keuangan Kampung

Selain solusi terhadap berbagai kendala yang ditemukan, penelitian ini juga menawarkan beberapa strategi pengembangan sebagai upaya peningkatan tata kelola keuangan Kampung Atibo di masa mendatang.

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Berbasis Kompetensi

Pengembangan aparatur Kampung perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran yang terstruktur.

Program yang dapat dilaksanakan meliputi:

- pelatihan berbasis kompetensi;
- sertifikasi pengelola keuangan Kampung;
- coaching dan mentoring;
- studi banding ke Kampung yang memiliki tata kelola keuangan terbaik.

Dengan demikian kompetensi aparatur Kampung akan terus berkembang sesuai tuntutan perubahan regulasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Kampung Terintegrasi

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi yang mengintegrasikan:

- perencanaan;
- penganggaran;
- pelaksanaan;
- penatausahaan;
- pelaporan;
- evaluasi.

Integrasi sistem tersebut akan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mempercepat penyediaan informasi kepada masyarakat.

3. Penguatan Budaya Organisasi Berbasis Transparansi

Budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas harus terus dikembangkan.

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada seluruh aparatur Kampung meliputi:

- kejujuran;
- akuntabilitas;
- disiplin;
- profesionalisme;
- pelayanan publik;
- tanggung jawab.

Budaya kerja tersebut akan memperkuat implementasi prinsip **good governance** dalam pemerintahan Kampung.

4. Penguatan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan Kampung merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak.

Oleh karena itu perlu diperkuat kolaborasi antara:

- Pemerintah Kampung;
- DPMK Kabupaten Teluk Bintuni;

- Inspektorat Daerah;
- Badan Permusyawaratan Kampung (BPD);
- Pendamping Kampung;
- Tokoh masyarakat;
- Tokoh adat;
- Masyarakat.

Kolaborasi tersebut akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Kampung.

5. Pengembangan Model Transparansi Keuangan Kampung Berbasis Good Governance

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan transparansi keuangan Kampung Atibo dapat dilakukan melalui model yang mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu:

1. **Komitmen kepemimpinan** dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
2. **Peningkatan kompetensi aparatur** melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
3. **Digitalisasi pengelolaan keuangan Kampung** untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi.
4. **Partisipasi aktif masyarakat** dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan Kampung.
5. **Pengawasan yang terintegrasi** oleh BPD, DPMK, Inspektorat, dan masyarakat.

Model tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Kampung yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara keseluruhan, peningkatan transparansi keuangan Kampung Atibo memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan fungsi pengawasan, serta pengembangan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Dengan dukungan DPMK Kabupaten Teluk Bintuni, BPD, pendamping Kampung, dan masyarakat, upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan Kampung yang semakin **transparan, akuntabel, efektif, partisipatif, dan**

berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan Kampung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung (Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)** yang telah dianalisis melalui wawancara terhadap 11 informan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Transparansi Keuangan Kampung Atibo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan Kampung Atibo telah dilaksanakan dengan **cukup baik**. Pemerintah Kampung telah menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes), laporan realisasi anggaran, serta pelaksanaan musyawarah kampung yang melibatkan masyarakat. Informasi keuangan juga dipublikasikan melalui baliho APBDes dan papan informasi Kampung sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui penggunaan dana Kampung.

Meskipun demikian, transparansi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif mengikuti musyawarah kampung maupun memanfaatkan informasi yang telah dipublikasikan. Selain itu, penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan merata.

2. Kinerja Perangkat Kampung dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Kampung

Kinerja perangkat Kampung Atibo secara umum berada pada kategori **baik** dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan Kampung. Hal ini terlihat dari pelaksanaan administrasi keuangan yang semakin tertib, koordinasi antarperangkat Kampung yang berjalan dengan baik, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kompetensi perangkat Kampung juga mengalami peningkatan melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni. Namun

demikian, peningkatan kapasitas aparaturnya masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan Kampung.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Keuangan Kampung

Penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung transparansi keuangan Kampung Atibo, yaitu komitmen kepala Kampung dan perangkat Kampung, pembinaan dan pendampingan dari DPMK, regulasi yang jelas, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPD), koordinasi antarperangkat Kampung, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparaturnya Kampung, perubahan regulasi yang cukup dinamis, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung administrasi, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana Kampung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa **keberhasilan transparansi keuangan Kampung Atibo sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja perangkat Kampung**. Semakin tinggi kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparaturnya Kampung, semakin baik pula penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan Kampung yang baik (*good governance*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kampung Atibo

Pemerintah Kampung Atibo perlu terus meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan Kampung dengan memperluas akses informasi kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kampung perlu meningkatkan kualitas administrasi, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni

DPMK diharapkan terus meningkatkan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah Kampung secara berkelanjutan. Program pelatihan dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan Kampung perlu dilaksanakan secara rutin agar kompetensi aparatur Kampung semakin meningkat, khususnya dalam memahami regulasi terbaru dan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan Kampung.

3. Bagi Badan Permusyawaratan Kampung (BPD)

BPD perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan Kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Kampung yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Masyarakat Kampung Atibo

Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah kampung, memanfaatkan informasi yang disediakan pemerintah Kampung, serta ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Kampung.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu Kampung dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa Kampung atau kabupaten sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan menambahkan variabel seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kepemimpinan kepala Kampung, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, atau partisipasi masyarakat sehingga diperoleh model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi transparansi keuangan Kampung.

Penutup

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa transparansi keuangan Kampung tidak hanya ditentukan oleh tersedianya informasi publik, tetapi juga oleh kualitas kinerja perangkat Kampung, efektivitas pembinaan pemerintah daerah, pengawasan yang berkesinambungan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemerintah Kampung, DPMK, BPD, pendamping Kampung, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Kampung yang **transparan, akuntabel, partisipatif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat**, sehingga tujuan pembangunan Kampung dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. Y. (2022). Peran Aplikasi Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes) dalam Akuntabilitas Dana Kampung dan Kinerja Aparatur di Kampung Tulungrejo. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(05), 643–650. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Dana Kampung Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
- Bappenas. (2024). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bappenas Working Papers, VIII(3).
- Defitri, S. Y. (2022). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Daerah (Studi Empiris pada OPD di Kota Solok). *Jurnal Ekonomia*, 12(1), 58–68.
- Dwi Pramudita, I., Julianti, M., Putri, R. E., Ananda, S., & Rodiah, S. (2024). Peran Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 7(1).
- Fitri, E. E., & Siregar, O. K. (2025). Analysis of Financial Performance of Village Fund Allocation Management Based on The Effectiveness Ratio and Growth Ratio at the Village Office Klambir District Hamparan Perak. *International Journal of Economics Accounting and Management*, 1(6), 464–470. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i6.1137>
- Hidayati, N. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes) dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Kampung. *Journal of Engineering Research*. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7461>
- Idrika, M., Mubyarto, N., & Anita, E. (2023). Analisis Pengukuran Value for Money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kampung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(3). <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.79749>
- Lihawa, N. I. P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>

- Maisyaroh, S., & Hidayat, M. (2026). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Kampung, Transparansi dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.D), 132–143.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Mojo, A., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kampung. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulanda, D., & Adnan, M. F. (2023). Implementasi Teori Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2).
- Prasetyo, B. (2023). Kendala dalam Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas di Tingkat Kampung: Suatu Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 16(3), 67–82.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Kampung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(4), 374–392.
- Rusdi, F. et al. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung: Analisa Tren Pengelolaan Dana Kampung 2016–2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*.
<https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/view/13>
- Safitri, P., Noholo, S., & Wuryandini, A. R. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kampung. *Jambura Accounting Review*, 4(2).
- Setyoningsih, Y., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kemampuan Kerja dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Kampung (Studi pada Kampung di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(1).
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kampung dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>

- Slamet, R. (2023). Peran Aparat Kampung sebagai Penggerak Pembangunan Kampung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Kampung*.
- Suwanti, & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Kampung. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Syafi'i Putra, D. A., & Sumtaky, M. (2026). Transparansi Laporan Keuangan Kampung dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Kampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16090–16098. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4188>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Kampung pada Kampung Se-Kecamatan Bumijawa. *Utility*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i1.3231>
- Wijiyono, I. F., Sari, N. K., & Ningsih, W. F. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Kampung (Siskeudes) dalam Menunjang Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Kampung Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 6(1), 126–142. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2288>
- Wulandari, K. R., & Dewi, P. E. D. M. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 282–291. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.69210>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Kampung Setiap Kampung, Penggunaan dan Penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian

Transparansi Keuangan Kampung dalam Perspektif Kinerja Perangkat Kampung (Studi Kasus di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni)

A. Identitas Informan

Nama

Jabatan

Instansi : Pemerintah Kampung Atibo

Lama Bekerja

Tanggal Wawancara

B. Pertanyaan Pembuka

1. Mohon Bapak/Ibu memperkenalkan diri serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kampung.
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Kampung?

C. Rumusan Masalah 1

Bagaimana tingkat transparansi keuangan Kampung di Kampung Atibo?

Indikator 1. Keterbukaan Informasi

1. Bagaimana pemerintah Kampung menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat?
2. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan Kampung?
3. Apakah masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kampung?

Indikator 2. Akses Informasi Publik

4. Bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin mengetahui laporan keuangan Kampung?

5. Apakah laporan keuangan Kampung dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka?

Indikator 3. Akuntabilitas

6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kampung kepada masyarakat atas penggunaan dana Kampung?
7. Seberapa rutin pemerintah Kampung menyampaikan laporan realisasi anggaran?

D. Rumusan Masalah 2

Bagaimana kinerja perangkat Kampung dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?

Indikator 1. Kualitas Kerja

8. Bagaimana kualitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung yang dilakukan perangkat Kampung?
9. Apakah perangkat Kampung bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku?

Indikator 2. Kompetensi

10. Apakah perangkat Kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan Kampung?
11. Apakah pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan Kampung?

Indikator 3. Tanggung Jawab

12. Bagaimana komitmen perangkat Kampung dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan?
13. Bagaimana bentuk koordinasi antarperangkat Kampung dalam pengelolaan keuangan?

Indikator 4. Pelayanan kepada Masyarakat

14. Bagaimana respon perangkat Kampung apabila masyarakat meminta informasi keuangan Kampung?
15. Apakah masyarakat merasa dilayani dengan baik terkait permintaan informasi tersebut?

E. Rumusan Masalah 3

Apa saja faktor pendukung dan penghambat transparansi keuangan Kampung?

Faktor Pendukung

16. Faktor apa yang paling mendukung terwujudnya transparansi keuangan Kampung?

17. Bagaimana peran kepala Kampung, BPD, dan masyarakat dalam mendukung transparansi?

Faktor Penghambat

18. Kendala apa yang sering dihadapi dalam mewujudkan transparansi keuangan Kampung?
19. Apakah keterbatasan SDM, sarana, atau pemahaman masyarakat menjadi hambatan?
20. Upaya apa yang perlu dilakukan agar transparansi keuangan Kampung semakin baik?

F. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi transparansi keuangan Kampung Atibo saat ini?
2. Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar pengelolaan keuangan Kampung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat?
3. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait transparansi keuangan Kampung yang belum sempat dibahas?